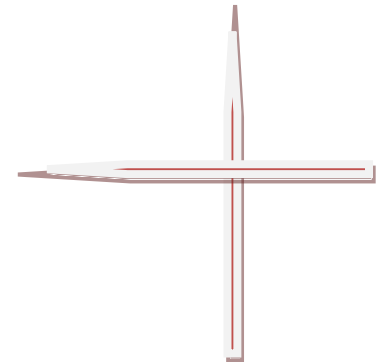
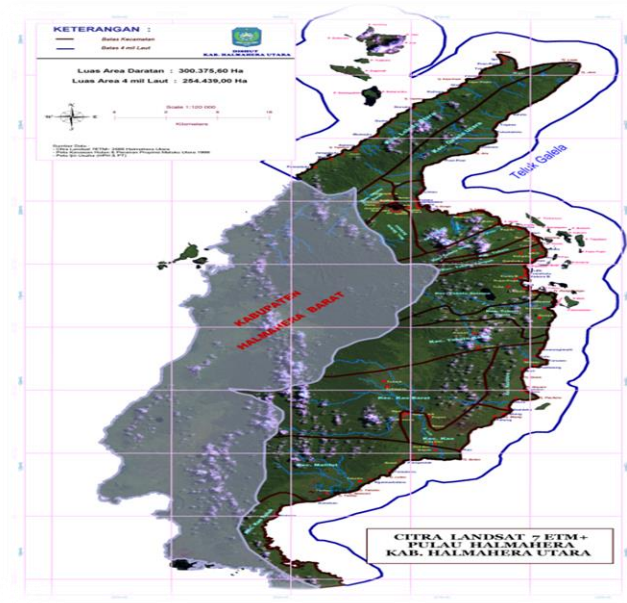


RENCANA KERJA 2025



TAHUN 2025

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Jl. Pemerintahan No 1 A



DOKUMEN RENCANA KERJA 2025 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025 merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disyaratkan dalam UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rencana kerja tersebut juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 untuk jangka waktu 1(satu) tahun, yang memuat rancangan prioritas program dan kegiatan yang akan direncanakan serta pendanaannya renja ini merupakan amanah yang tertuang dalam inpres 5/2004 tentang percepatan Pemberantasan korupsi. Dengan demikian penetapan kinerja ini harus dipandang sebagai salah satu langkah sistimatis yang diperlukan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi. Penetapan kinerja Dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten Halmahera Utara memberikan gambaran tentang tahapan yang akan dicapai dalam menjalankan kegiatan-kegiatan. Untuk mendukung program dan kegiatan yang akan ditetapkan pada tahun 2025 yang didanai dari APBD Kabupaten Halmahera Utara tahun 2025, dalam prosesnya bermuara pada Kebijakan Umum APBD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023. Akhir kata terima kasih kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaganya baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan rencana kerja ini.

Tobelo, 7 Maret 2024

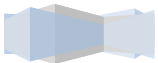
Kepala Dinas
Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Halmahera Utara

Drs. NYOTER J.C. KOENOE, M.Si

NIP. 196801121988031008



**DOKUMEN RENCANA KERJA 2025
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**





DOKUMEN RENCANA KERJA 2025 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025 merupakan Rencana Kerja Tahunan sebagai penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Halmahera Utara tahun 2025. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Proses Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025 tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan didalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, agar didalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara sebagai salah satu SKPD Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor : 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dan berpedoman pada Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor : 36 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Dinas



DOKUMEN RENCANA KERJA 2025 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA

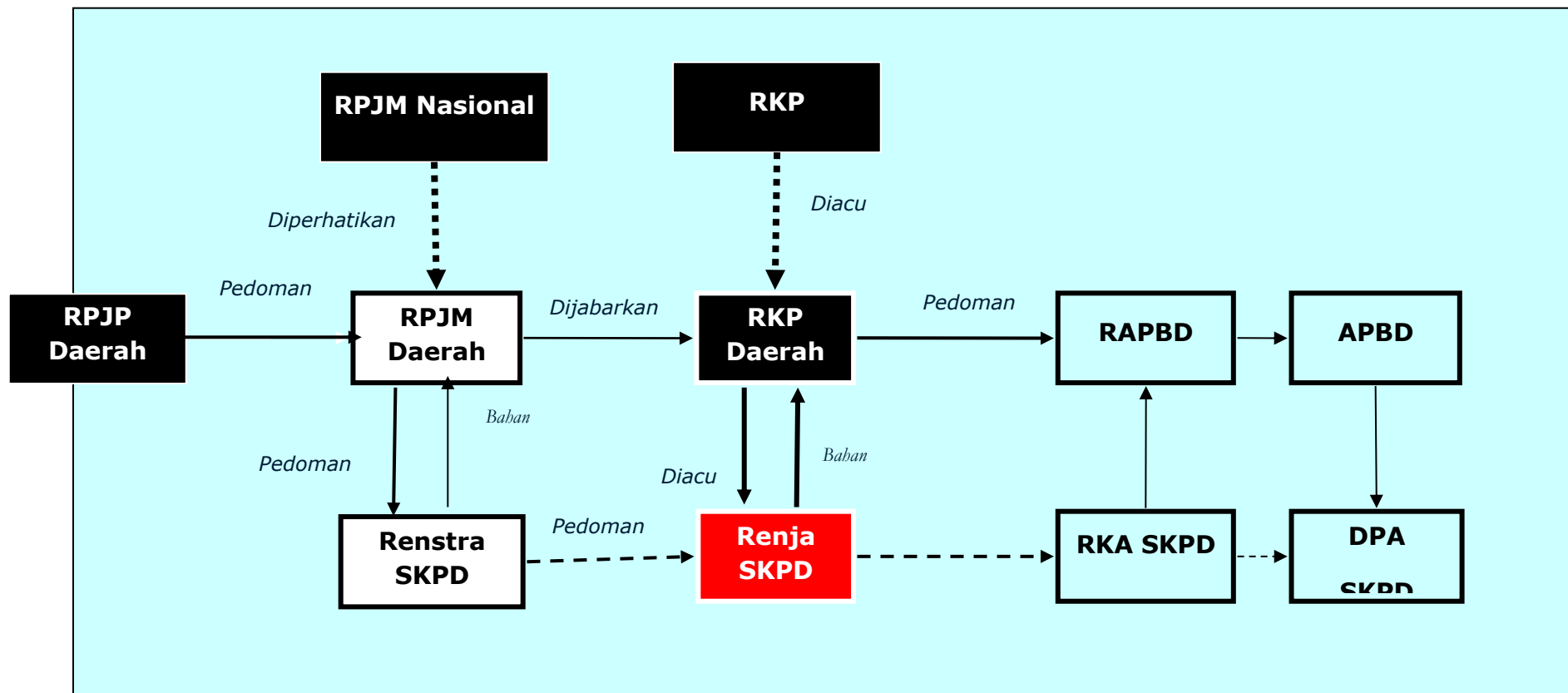
Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara. Dalam rangka menindaklanjuti RPJMD Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 maka dijabarkan ke dalam dokumen perencanaan SKPD dalam bentuk dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 yang disusun berdasarkan tahapan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders). Dengan demikian RENSTRA ini menjadi dasar penyusunan usulan Kebijakan Umum APBD (KUA), Rencana Kerja (RENJA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) setiap tahunnya.

RENSTRA merupakan awal dari perencanaan lima tahun kedepan yang akan disinkronisasikan dengan hasil musrembang yang diadakan tiap tahunnya. Hasil sinkronisasi ini akan menghasilkan RENJA TAHUNAN yang menjadi dasar penyusunan Perincian Plafond Anggaran (PPAS SKPD). Penetapan KUA-PPAS pada akhirnya akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD).

Adapun dalam penyusunan RENJA maupun RKA diharapkan agar senantiasa sejalan dan mendukung Program Kerja Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi. RENJA yang telah dievaluasi akan menjadi RKPD Kabupaten. Sebagai dokumen perencanaan, RENJA Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara, juga berfungsi sebagai tolok ukur kinerja penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di sektor Perdagangan, Perindustrian dan ESDM untuk Tahun Anggaran berikutnya. Dengan demikian komitmen dan konsistensi penyelenggara pemerintahan terhadap RENJA menjadi sangat penting untuk mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, salah satunya oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian.



DOKUMEN RENCANA KERJA 2025 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA



Tabel I.1. Hubungan Antara Dokumen Perencanaan



DOKUMEN RENCANA KERJA 2025 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara antara lain :

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- Peraturan Pemerintah RI. Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



DOKUMEN RENCANA KERJA 2025 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016, Nomor 8);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025 adalah sebagai acuan arah kebijakan Pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025 adalah agar dokumen perencanaan yang telah disusun dapat dijadikan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian sehingga dapat mewujudkan sinergitas antar dokumen perencanaan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara meliputi :



DOKUMEN RENCANA KERJA 2025 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja K/L dan Renja provinsi/kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintahan, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKATN DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja



DOKUMEN RENCANA KERJA 2025 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang di kaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah,
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;



DOKUMEN RENCANA KERJA 2025 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda;

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:



DOKUMEN RENCANA KERJA 2025 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Misal:

- a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
- b. Pencapaian SDGs,
- c. Pengentasan kemiskinan,
- d. Pencapaian NSPK dan SPM,



DOKUMEN RENCANA KERJA 2025 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA

- e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
- f. Pengembangan daerah terisolir,
- g. Dsb.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- c. Rencana tindak lanjut.



**DOKUMEN RENCANA KERJA 2025
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara pada APBDP Tahun 2023 mengelola anggaran belanja daerah sebesar Rp. 6.673.289.696, terdiri dari :

I. BELANJA OPERASI

- 1. Belanja Pegawai : Rp. 2.675.735.652
- 2. Belanja Barang dan Jasa : Rp. 3.486.354.044

II. BELANJA MODAL

- 1. Belanja Modal Gedung dan Bangunan : Rp. 824.200.000

Dimana Jumlah Belanja Operasi sebesar Rp. 6.162.089.696,- dan Jumlah Belanja Modal sebesar Rp. 824.200.000,- Pagu anggaran belanja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara tahun 2023 bersumber dari dana APBD (DAU). Adapun Realisasi Anggaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023 berjumlah sebesar Rp. 4.392.001.890,- atau sebesar 71,27% .

sebagaimana pada tabel dibawah ini :



DOKUMEN RENCANA KERJA 2025 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Tabel II.1. Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2023

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1.	Belanja Daerah	Rp. 6.673.289.696	Rp. 4.392.001.890	71,27 %

Untuk lebih jelasnya realisasi anggaran per program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023 dapat dijelaskan dibawah ini :



DOKUMEN RENCANA KERJA 2025 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Tabel II.2. Realisasi Anggaran Per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN TAHUN 2023 YANG DIEVALUASI		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DI EVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DI EVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA s/d TAHUN 2023 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9=(5+7)		10=(9/4)*100		13
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Bidang Urusan Perindustrian dan Perdagangan																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah	90,00 %	23.038.711.324	81,46	6.477.059.516	90,00	3.982.536.196	56,54	2.403.280.090	62,82	60,35	138,00	8.880.339.606	153,33	38,55	Sekretariat
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah (Persen)	100,00 %	179.125.024	100,00	58.522.652	100,00	29.260.400	100,00	29.260.400	100,00	100,00	200,00	87.783.052	200,00	49,01	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dok	123.622.979	6	40.389.166	3	20.194.200	3	20.194.200	100,00	100,00	9,00	60.583.366	50,00	49,01	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Lap	55.502.045	2	18.133.486	1	9.066.200	1	9.066.200	100,00	100,00	3,00	27.199.686	50,00	49,01	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (Persen)	100,00 %	15.382.507.123	68,41	4.895.613.859	100,00	2.740.858.852	45,64	1.666.039.290	45,64	60,79	114,05	6.561.653.149	114,05	42,66	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	156 Orang/Bulan	15.256.361.140	46	4.854.330.177	26	2.720.085.652	26	1.659.786.990	100,00	61,02	72,00	6.514.117.167	46,15	42,70	



DOKUMEN RENCANA KERJA 2025 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	6 Lap	51.025.576	2	16.449.300	1	8.388.700	1	6.252.300	100,00	74,53	3,00	22.701.600	50,00	44,49	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	108 Lap	75.120.406	36	24.834.382	18	12.384.500	0	-	0,00	0,00	36,00	24.834.382	33,33	33,06	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)	100,00 %	889.435.741	50,00	133.656.500	100,00	158.354.800	0	0	0,00	0,00	50,00	133.656.500	50,00	15,03	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	68 Paket	95.200.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dok	33.720.450	0,00	0	1	8.224.200	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dok	50.776.450	0,00	0	1	12.384.400	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	709.738.841	8	133.656.500	8	137.746.200	0	0	0,00	0,00	8,00	133.656.500	20,00	18,83	



DOKUMEN RENCANA KERJA 2025 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN HALMAHEIRA UTARA

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)	100,00 %	1.384.707.331	98,00	550.404.000	100,00	227.284.700	67,78	132.252.000	67,78	58,19	165,78	682.656.000	165,78	49,30	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	243.437.868	2	74.886.000	1	37.480.000	0	-	0,00	0,00	2,00	74.886.000	33,33	30,76	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	73.459.296	2	18.324.000	1	11.999.700	58,92	7.070.000	5892,00	58,92	60,92	25.394.000	1015,33	34,57	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dok	185.625.852	2	60.378.000	1	30.323.000	85,74	26.000.000	8574,00	85,74	87,74	86.378.000	1462,33	46,53	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Lap	71.512.625	2	21.237.000	1	11.682.000	100	11.682.000	10000,00	100,00	102,00	32.919.000	1700,00	46,03	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Lap	810.671.690	2	375.579.000	1	135.800.000	94,26	87.500.000	9426,00	64,43	96,26	463.079.000	1604,33	57,12	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100,00 %	2.347.601.591	75,00	517.144.000	100,00	369.448.644	32,47	144.839.600	32,47	39,20	107,47	661.983.600	107,47	28,20	



DOKUMEN RENCANA KERJA 2025 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Lap	1.125.611.396	2	279.029.000	1	183.866.344	65,32	120.093.900	6532,00	65,32	67,32	399.122.900	1122,00	35,46	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Lap	709.342.991	1	108.644.000	1	108.433.900	0	0	0,00	0,00	1,00	108.644.000	16,67	15,32	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Lap	512.647.204	2	129.471.000	1	77.148.400	32,08	24.745.700	3208,00	32,08	34,08	154.216.700	568,00	30,08	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100,00 %	2.855.334.515	100,00	321.718.505	100,00	457.328.800	93,37	430.888.800	93,37	94,22	193,37	752.607.305	193,37	26,36	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	1.123.965.043	8,00	303.768.505	4	173.328.800	85	147.328.800	2125,00	85,00	93,00	451.097.305	387,50	40,13	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	108 Unit	55.094.472	38	17.950.000	20	9.000.000	95,11	8.560.000	475,55	95,11	133,11	26.510.000	123,25	48,12	
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	1.526.275.000	0	0	20	275.000.000	100	275.000.000	500,00	100,00	100,00	275.000.000	125,00	18,02	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 Paket	150.000.000	0	0	0	0	0	0		0,00		-	0,00	0,00	
Bidang Urusan Perdagangan																
Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Presentase permohonan perizinan usaha perdagangan (IPP/SIUP Pusat, Perbelanjaan dan	11.9 %	867.178.506	5,00	122.500.000	11,90	174.998.800	0	0	0,00	0,00	5,00	122.500.000	42,01	14,13	Bid. Perdagangan

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN



DOKUMEN RENCANA KERJA 2025 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN HALMAHEIRA UTARA

Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Presentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan	87 %	118.875.706	38	21.000.000	80	24.419.600	0	0	0,00	0,00	37,50	21.000.000	43,10	17,67
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	20 Dok	118.875.706	4	21.000.000	4	24.419.600	0	0	0,00	0,00	4,00	21.000.000	20,00	17,67
Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Presentase penerbitan TDG	85 %	215.117.300	33	42.000.000	75	43.079.200	0	0	0,00	0,00	33,00	42.000.000	38,82	19,52
Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	20 Dok	215.117.300	2	42.000.000	2	43.079.200	0	0	0,00	0,00	2,00	42.000.000	10,00	19,52
Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Presentase penerbitan STPW	50 %	48.311.100	0	0	50	9.841.000	0	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	10 Dok	48.311.100	0	0	2	9.841.000	0	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual	Presentase penerbitan Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	90 %	68.291.100	0	0	85	13.911.000	0	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual	20 Dok	68.291.100	0	0	4	13.911.000	0	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi Pengemasan dan	Presentase pengendalian /pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan	100 %	56.916.000	0	0	100	11.594.000	0	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	5 Lap	56.916.000	0	0	1	11.594.000	0	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten /Kota yang telah ditetapkan sebagai Instansi Penerbit	Presentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	100 %	359.667.300	50	59.500.000	100	72.154.000	0	0	0,00	0,00	50,00	59.500.000	50,00	16,54
Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	15 Lap	359.667.300	3	59.500.000	3	72.154.000	0	0	0,00	0,00	3,00	59.500.000	20,00	16,54



DOKUMEN RENCANA KERJA 2025 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar Rakyat /Tradisional yang beroperasi secara normal	82,60 %	20.316.431.096	45,00	1.198.396.750	69,60	1.416.544.500	60,59	789.709.600	87,05	55,75	105,59	1.988.106.350	127,83	9,79	Bid. Perdagangan
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Presentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	100 %	17.547.921.725	0	0	100	513.734.900	0	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	6 Unit	17.547.921.725	0	0	1	513.734.900	0	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Presentase Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	80 %	2.768.509.371	55,00	1.198.396.750	75,00	902.809.600	75	789.709.600	100,00	87,47	130,00	1.988.106.350	162,50	71,81	
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	6 Dok	2.768.509.371	2	1.198.396.750	1	902.809.600	1	789.709.600	100,00	87,47	3,00	1.988.106.350	50,00	71,81	
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase jumlah jenis barang beredar yang sudah diawasi sesuai ketentuan	57,60 %	3.507.988.100	36,15	809.999.100	43,30	659.999.500	25	563.539.500	57,74	85,38	61,15	1.373.538.600	106,16	39,15	
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan keamanan level stok Barang Kebutuhan Pokok dan Penting Halmahera Utara	100 %	430.466.462	0	0	100	93.398.500	18,24	17.038.000	18,24	18,24	18,24	17.038.000	18,24	3,96	
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	5 Lap	286.995.372	0	0	1	57.799.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	4 Lap	71.553.990	0	0	1	17.799.500	1	17.038.000	100,00	95,72	1,00	17.038.000	25,00	23,81	
Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat	4 Lap	71.917.100	0	0	1	17.799.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	



DOKUMEN RENCANA KERJA 2025 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN HALMAHEIRA UTARA

Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Cakupan Pengendalian Harga dan Stok Bapokting	100 %	2.956.622.148	95,00	769.899.600	100	546.501.500	100	546.501.500	100,00	100,00	195,00	1.316.401.100	195,00	44,52	
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantau an Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	6 Dok	355.374.148	2	249.650.000	1	26.252.000	1	26.252.000	100,00	100,00	3,00	275.902.000	50,00	77,64	
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	10 Lap	2.601.248.000	2	520.249.600	2	520.249.500	2	520.249.500	100,00	100,00	4,00	1.040.499.100	40,00	40,00	
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pemantauan /pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi	100 %	120.899.490	50	40.099.500	100	20.099.500	0	0	0,00	0,00	50,00	40.099.500	50,00	33,17	
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	5 Lap	120.899.490	1	40.099.500	1	20.099.500	0	0	0,00	0,00	1,00	40.099.500	20,00	33,17	
Program Pengembangan Ekspor	Pertumbuhan nilai ekspor non komoditas migas dan pertambangan yang SKA nya diterbitkan	39,50 %	1.707.602.000	2	22.261.000	24,50	349.999.100	0	0	0,00	0,00	2,00	22.261.000	5,06	1,30	Bid. Perdagangan
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat Pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Penyelenggara an Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat Pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.707.602.000	4	22.261.000	100	349.999.100	0	0	0,00	0,00	3,50	22.261.000	3,50	1,30	
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten /Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	50 Pelaku Usaha	129.645.160	10	22.261.000	10	26.030.900	0	0	0,00	0,00	10,00	22.261.000	20,00	17,17	
Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	5 Pelaku Usaha	1.139.352.560	0	-	1	228.767.200	0	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	5 Pelaku Usaha	438.604.280	0	-	1	95.201.000	0	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase laporan pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti	100 %	1.226.913.500	50,00	186.914.000	100,00	249.999.700	100	202.183.300	100,00	80,87	150,00	389.097.300	150,00	31,71	
Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Presentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	97,00 %	1.226.913.500	47	186.914.000	94	249.999.700	100	202.183.300	106,38	80,87	146,50	389.097.300	151,03	31,71	



DOKUMEN RENCANA KERJA 2025 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN HALMAHEIRA UTARA

Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	2220 Unit	613.399.500	259	73.400.000	45	124.999.700	200	77.183.300	444,44	61,75	459,00	150.583.300	20,68	24,55	
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	250 Unit	613.514.000	259	113.514.000	50	125.000.000	135	125.000.000	270,00	100,00	394,00	238.514.000	157,60	38,88	
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Cakupan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri (persentase terhadap rencana tahun berkenaan)	100 %	465.520.000	50	65.120.500	100	99.999.800	50	40.799.400	50,00	40,80	100,00	105.919.900	100,00	22,75	Bid. Perdagangan
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Presentase Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	100 %	465.520.000	50	65.120.500	100	99.999.800	50	40.799.400	50,00	40,80	100,00	105.919.900	100,00	22,75	
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace,	50 UMKM	262.322.540	50	25.520.500	10	59.200.400	0	0	0,00	0,00	50,00	25.520.500	100,00	9,73	
Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	5 Dok	203.197.460	1	39.600.000	1	40.799.400	1	40.799.400	100,00	100,00	2,00	80.399.400	40,00	39,57	
Bidang Urusan Perindustrian																
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pertumbuhan jumlah industri kecil (persen)	7.2 %	8.265.250.883	6	2.800.548.700	7,0	1.735.613.100	5	239.639.700	71,43	13,81	10,80	3.040.188.400	150	36,78	Bid. Perindustrian
Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Presentase Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	99 %	8.265.250.883	75	2.800.548.700	94	1.735.613.100	95	239.639.700	101,06	13,81	170,00	3.040.188.400	171,72	36,78	
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	5 Dok	335.446.548	0	-	1	43.449.400	1	43.449.400	100,00	100,00	1,00	43.449.400	20,00	12,95	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayaban	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan	6 Dok	403.140.939	2	68.000.000	1	47.799.000	0	0	0,00	0,00	2,00	68.000.000	33,33	16,87	



DOKUMEN RENCANA KERJA 2025 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN HALMAHEIRA UTARA

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	5 Dok	1.379.960.120	1	248.299.500	1	248.299.400	0	0	0,00	0,00	1,00	248.299.500	20,00	17,99	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	5 Dok	3.630.690.296	1	2.067.749.200	1	150.000.000	1	150.000.000	100,00	100,00	2,00	2.217.749.200	40,00	61,08	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Masyarakat	5 Dok	2.289.612.500	1	416.500.000	1	1.199.875.000	0	0	0,00	0,00	1,00	416.500.000	20,00	18,19	
Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	5 Dok	226.400.481	0	0	1	46.190.300	1	46.190.300	100,00	100,00	1,00	46.190.300	20,00	20,40	
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten /Kota	Presentase permohonan perijinan usaha industri yang diterbitkan rekomendasi teknisnya	100 %	457.799.500	0	0	100	99.999.900	0	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bid. Perindustrian
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten /Kota	Presentase Jumlah Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten /Kota yang diterbitkan	75 %	457.799.500	0	0	75	99.999.900	0	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten /Kota dalam Sistem Informasi Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis	4 Dok	128.802.000	0	0	1	32.200.400	0	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	5 Dok	328.997.500	0	0	1	67.799.500	0	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Presentase jumlah industri kecil dan sedang yang terdaftar dalam basis data SIINAS	100 %	440.099.500	25	39.600.000	100	100.000.000	0	50.099.500	0,00	50,10	25,00	89.699.500	25,00	20,38	Bid. Perindustrian
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase data perusahaan industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten /Kota	90 %	440.099.500	40	39.600.000	84	100.000.000	64,91	50.099.500	77,27	50,10	104,91	89.699.500	116,57	20,38	



DOKUMEN RENCANA KERJA 2025 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN HALMAHEIRA UTARA

Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui	5 Dok	240.497.500	1	39.600.000	1	50.099.500	1	50.099.500	100,00	100,00	2,00	89.699.500	40,00	37,30	
Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri	4 Dok	199.602.000		-	1	49.900.500	0	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
Bidang Urusan Energi Sumber Daya Mineral																
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Cakupan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan (persentase terhadap rencana tahun berikutnya)	100 %	1.101.698.500	25	30.449.500	100	249.999.100	49,68	102.750.800	49,68	41,10	74,68	133.200.300	74,68	12,09	Bid. ESDM
Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten /Kota	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki izin di Kab /Kota	100 %	1.101.698.500	25	30.449.500	100	249.999.100	49,68	102.750.800	49,68	41,10	74,68	133.200.300	74,68	12,09	
Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	5 Dok	448.247.500	1	30.449.500	1	104.449.200	1	45.000.000	100,00	43,08	2,00	75.449.500	40,00	16,83	
Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten /Kota	5 Dok	408.997.500	0	0	1	87.799.100	0	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten	5 Lap	244.453.500	0	0	1	57.750.800	1	57.750.800	100,00	100,00	1,00	57.750.800	20,00	23,62	



DOKUMEN RENCANA KERJA 2025 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Dengan menggunakan format Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran dilakukan pengukuran kinerja untuk tahun 2023 dan berdasarkan 20 indikator di atas diperoleh hasil capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara sebesar 71,27 %. Dengan capaian kinerja dan keuangan tersebut Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara dapat dikategorikan sebagai instansi yang berhasil dalam pencapaian kinerjanya.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/ kegagalan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian tahun 2023 ada 11 Program, 24 Kegiatan dan 48 Sub Kegiatan. Beberapa evaluasi realisasi program/kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Pada tahun 2023 ada 11 Program ini terdapat 9 (Sembilan) Program di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara yang tidak memenuhi target kinerja ($\leq 100\%$) sebagaimana yang telah direncanakan yaitu :

Penyebab tidak terpenuhinya target kegiatan tersebut di atas disebabkan Kegiatan dikarenakan tidak ada ketersediaan anggaran yang tidak dapat terserap dan juga ada penghematan anggaran.

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Dari 11 program di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2023 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran sesuai dengan yang direncanakan (100%) ada 2 Program.



DOKUMEN RENCANA KERJA 2025 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA

f. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan (> 100%) untuk tahun 2023 tidak ada,

f. Faktor-faktor yang menyebabkan tercapainya/terpenuhinya target kinerja program/kegiatan.

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.

e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra SKPD.

Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian sehingga implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara.

f. Kebijakan/21indakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktorfaktor penyebab tersebut.

Adapun kebijakan/21indakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan memberikan argumentasi atas program/kegiatan tersebut sehingga nantinya dapat dianggarkan pelaksanaan program/kegiatan yang mengarah pada pengembangan pelayanan.



DOKUMEN RENCANA KERJA 2025 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 08 Tahun 2016, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara mempunyai **tugas** Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perdagangan, perlindungan konsumen, perindustrian dan ESDM.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi mempunyai *fungsi* yaitu;

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan, perlindungan konsumen, perindustrian dan ESDM;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perdagangan, perlindungan konsumen, perindustrian dan ESDM;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perdagangan, perlindungan konsumen, perindustrian dan ESDM;
4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengantugas dan fungsinya.

Kegiatan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, pelaku usaha yang dikelola dan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian kabupaten Halmahera Utara dalam era otonomi daerah dan reformasi birokrasi pemerintahan adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan terhadap pedagang pasar
2. Pelayanan terhadap pelaku usaha
3. Pelayanan terhadap IKM
4. Pelayanan Energi Baru Terbarukan



DOKUMEN RENCANA KERJA 2025 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Tabel 2.2 (Tabel T-C. 30)											
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian											
Kabupaten Halmahera Utara											
No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Presentase rumah tangga menggunakan listrik			98,02%	98,14%	98,31%	98,55%		81,14%	84,50%	
2	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan			3,79%	4,12%	4,41%	4,65%		2,56%	2,62%	
3	Pertumbuhan PDRB Perdagangan			10,49%	10,81%	11,13%	11,47%		5,11%	3,06%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kondisi lingkungan kerja yang diharapkan tentunya dapat memberikan dukungan optimal terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, program kerja Dinas/Instansi serta stakeholder guna terwujudnya Visi Pembangunan Daerah dan pencapaian sasaran program pembangunan menuju Halmahera Utara yang mantap.



DOKUMEN RENCANA KERJA 2025 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Dinas Perdagangan & Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara sebagai instansi teknis dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Perdagangan dan Perindustrian, mengalami masalah antara lain :

1. ESDM
 - a. Belum optimalnya pemanfaatan potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) yang ditandai dengan belum adanya fasilitas pembangkit tenaga listrik bersumber EBT, serta belum memadainya sarana penerangan jalan bersumber EBT.
2. Perdagangan
 - a. Belum meratanya ketersediaan sarana dan prasarana distribusi perdagangan
 - b. Belum optimalnya penyebaran informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, meliputi ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah.
 - c. Masih rendahnya volume maupun nilai produk ekspor daerah
3. Perindustrian
 - a. Masih belum optimalnya perkembangan industri kecil
 - b. Masih rendahnya kapasitas industri yang memiliki standar produksi layak

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja yang merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian



**DOKUMEN RENCANA KERJA 2025
S PERDAGANGAN DAN PERINDUST
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 guna dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rancangan Rencana Kerja memuat informasi tentang Rumusan kebutuhan program dan kegiatan hasil review terhadap rancangan awal RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara dan Identifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah berikut pendanaan indikatif.

Tabel 2.3(Tabel T.C.31)

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024

KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Nama Perangkat Daerah : : Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	90%		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	90%		
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tingkat Konsistensi perencanaan perangkat daerah (Persen)	100		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tingkat Konsistensi perencanaan perangkat daerah (Persen)	100		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dagperin	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	20.194.200	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dagperin	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	4.515.000	



DOKUMEN RENCANA KERJA 2025 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dagperin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	9.066.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dagperin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.616.200	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tingkat Realisasi pelaksanaan anggaran perangkat daerah (Persen)	100%		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tingkat Realisasi pelaksanaan anggaran perangkat daerah (Persen)	100%		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dagperin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	2.720.085.652	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dagperin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	2.570.085.652	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dagperin	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Yang Disusun	1 Dokumen	8.388.700	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dagperin	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Yang Disusun	1 Dokumen	4.490.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dagperin	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Lap	12.384.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dagperin	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Lap	3.710.000	



DOKUMEN RENCANA KERJA 2025 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100		
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tobelo	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	8.224.500	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tobelo	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.349.000	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tobelo	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	12.384.500	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tobelo	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	3.710.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jakarta	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	100.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jakarta	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	44.597.700	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Administrasi Umum perangkat daerah (Persen)	100		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Administrasi Umum perangkat daerah (Persen)	100		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dagperin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	37.480.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dagperin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.399.600	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dagperin	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	11.999.700	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dagperin	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.445.000	



DOKUMEN RENCANA KERJA 2025 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dagperin	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	30.323.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dagperin	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	30.929.460,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dagperin	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	11.682.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dagperin	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	11.915.640	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dagperin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	135.800.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dagperin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	138.156.000,00	



DOKUMEN RENCANA KERJA 2025 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dagperin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	183.866.344	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dagperin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	95.593.800	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dagperin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	58.433.900	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dagperin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	50.870.800	



DOKUMEN RENCANA KERJA 2025 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN HALMAHEIRA UTARA

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dagperin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	77.148.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dagperin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	43.660.700	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dagperin	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	173.328.800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dagperin	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	125.140.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dagperin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	9.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dagperin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	46.999.600	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Dagperin	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	150.000.000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Dagperin	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	58.380.000	
	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan		Cakupan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan (persentase terhadap rencana tahun berkenaan)	100%		Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan		Cakupan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan (persentase terhadap rencana tahun berkenaan)	100%		



DOKUMEN RENCANA KERJA 2025 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota		Presentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki izin di Kab/Kota	100%		Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota		Presentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki izin di Kab/Kota	100%		
	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tobelo	Jumlah Prosedur dan Pesyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	31.146.500	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tobelo	Jumlah Prosedur dan Pesyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	13.082.000	
	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tobelo	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	40.000.000	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tobelo	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	16.357.400	
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tobelo	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	40.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tobelo	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	7.240.000	
	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan		Presentase permohonan perijinan usaha perdagangan (IPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) yang diterbitkan rekomendasi teknisnya.	11,9		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan		Presentase permohonan perijinan usaha perdagangan (IPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) yang diterbitkan rekomendasi teknisnya.	11,9		



DOKUMEN RENCANA KERJA 2025 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan</i>		<i>Presentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan</i>	83%		<i>Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan</i>		<i>Presentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan</i>	83%		
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tobelo	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Dokumen	24.419.801	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tobelo	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Dokumen	10.019.600	
	<i>Penerbitan Tanda Daftar Gudang</i>		<i>Presentase penerbitan TDG</i>	80		<i>Penerbitan Tanda Daftar Gudang</i>		<i>Presentase penerbitan TDG</i>	80		
	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Loloda, Kao, Galela, Tobelo	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	2 Dokumen	33.079.450	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Loloda, Kao, Galela, Tobelo	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	2 Dokumen	16.679.300	
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		Persentase Pasar Rakyat/Tradisional yang beroperasi secara normal	73,9		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		Persentase Pasar Rakyat/Tradisional yang beroperasi secara normal	73,9		
	<i>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</i>		<i>Presentase Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</i>	75		<i>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</i>	Tobelo, Kao, Galela	<i>Presentase Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</i>	75		



DOKUMEN RENCANA KERJA 2025

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

KABUPATEN HALMAHEIRA UTARA

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Tobelo, Kao, Galela	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	86.469.584	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Tobelo, Kao, Galela	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	27.869.500	
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		Persentase jumlah jenis barang beredar yang sudah diawasi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan	48%		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		Persentase jumlah jenis barang beredar yang sudah diawasi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan	48%		
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan keamanan level stok Barang Kebutuhan Pokok dan Penting Halmahera Utara	100%		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan keamanan level stok Barang Kebutuhan Pokok dan Penting Halmahera Utara	100%		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Tobelo, Kao, Galela, Loloda	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 Laporan	20.747.600	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Tobelo, Kao, Galela	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 Laporan	12.247.600	
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Cakupan Pengendalian Harga dan Stok Bapokting	100		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Cakupan Pengendalian Harga dan Stok Bapokting	100		
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Loloda, Tobelo, Kao, Galela, Loloda	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	20.252.400	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Loloda, Tobelo, Kao, Galela, Loloda	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	12.251.900	



DOKUMEN RENCANA KERJA 2025

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

KABUPATEN HALMAHEIRA UTARA

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Pengembangan Ekspor		<i>Presentase Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat Pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	24,5		Program Pengembangan Ekspor		<i>Presentase Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat Pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	24,5		
	<i>Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat Pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>		Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	100		<i>Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat Pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>		Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	100		
	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Tobelo	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	10 Pelaku Usaha	26.031.165	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Tobelo	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	10 Pelaku Usaha	26.031.165	
	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen		<i>Persentase laporan pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti</i>	100		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen		<i>Persentase laporan pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti</i>	100		
	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Loloda, Tobelo, Kao, Galela	<i>Presentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan</i>	95		Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Loloda, Tobelo, Kao, Galela	<i>Presentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan</i>	95		
	<i>Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang</i>	Loloda, Tobelo, Kao, Galela	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	50 Unit	105.000.000	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Loloda, Tobelo, Kao, Galela	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	50 Unit	36.675.600	



DOKUMEN RENCANA KERJA 2025 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN HALMAHEIRA UTARA

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Loloda, Tobelo, Kao, Galela	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	50 Orang	104.000.000	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Loloda, Tobelo, Kao, Galela	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	50 Orang	47.139.400	
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		Cakupan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri (persentase teradap rencana tahun berkenaan)	100		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		Cakupan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri (persentase teradap rencana tahun berkenaan)	100		
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Persentase Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	100		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Persentase Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	100		
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Tobelo, Galela, Kao, Loloda	Jumlah UMKM yang melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	10 UMKM	49.200.510	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Tobelo, Galela, Kao, Loloda	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	10 UMKM	34.356.100	
	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Tobelo, Galela, Kao, Loloda	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1 Dokumen	30.799.490	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Tobelo, Galela, Kao, Loloda	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1 Dokumen	-	
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri		Pertumbuhan jumlah industri kecil (persen)	7,1		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri		Pertumbuhan jumlah industri kecil (persen)	7,1		
	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Persentase Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	96		Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Persentase Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	96		
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jakarta	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	52.578.900	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jakarta	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	19.663.800	



DOKUMEN RENCANA KERJA 2025 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN HALMAHEIRA UTARA

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri</i>	<i>Tobelo, Kao, Galela</i>	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	40.809.748	<i>Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri</i>	<i>Tobelo, Kao, Galela</i>	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	11.209.700	
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota		Presentase permohonan perijinan usaha industri yang diterbitkan rekomendasi teknisnya	100		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota		Presentase permohonan perijinan usaha industri yang diterbitkan rekomendasi teknisnya	100%		
	<i>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</i>		<i>Presentase Jumlah Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota yang diterbitkan</i>	75		<i>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</i>		<i>Presentase Jumlah Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota yang diterbitkan</i>	75		
	<i>Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara</i>	<i>Tobelo, Kao, Galela, Loloda</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan</i>	1 Dokumen	32.200.500	<i>Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha</i>	<i>Tobelo, Kao, Galela, Loloda</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan</i>	1 Dokumen	16.200.200	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jakarta</i>	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	47.799.500	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jakarta</i>	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	23.738.900	
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional		Presentase jumlah industri kecil dan sedang yang terdaftar dalam basis data SIINAS	100%		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional		Presentase jumlah industri kecil dan sedang yang terdaftar dalam basis data SIINAS	100%		



DOKUMEN RENCANA KERJA 2025 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN HALMAHEIRA UTARA

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</i>		<i>Presentase data perusahaan industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	86		<i>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</i>		<i>Presentase data perusahaan industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	86		
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Tobelo, Galela, Kao, Loloda	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	1 Dokumen	40.099.500	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Tobelo, Galela, Kao, Loloda	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	1 Dokumen	14.599.200	
	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam penyampaian data ke SIINAS	Tobelo, Galela, Kao, Loloda	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINAS	1 Dokumen	36.511.852	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam penyampaian data ke SIINAS	Tobelo, Galela, Kao, Loloda	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINAS	1 Dokumen	19.065.000	



DOKUMEN RENCANA KERJA 2025 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026. RENJA Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023. Dalam konteks perencanaan pembangunan sektor Perindustrian dan perdagangan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Disisi lain dalam era globalisasi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara dituntut untuk siap dan sanggup membuat atau menyusun perencanaan yang baik sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

URUSAN PERINDUSTRIAN

Program dan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan usulan dan kebutuhan masyarakat melalui proses Musrenbang sesuai dengan tahapan serta dengan mencermati program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Dokumen Renstra SKPD. Tahapan selanjutnya adalah perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan dan monitoring yang menurut aturan dan ketentuan termasuk kemungkinan pelibatan unsur/pihak ketiga termasuk jasa konsultasi serta rekanan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perkembangan sektor industri dilaksanakan dengan tujuan memperkuat struktur ekonomi daerah, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, penguatan dan pendalaman struktur industri yang terkait dengan agro industri, industri kecil dan menengah serta industri kerajinan dan rumah tangga dengan memanfaatkan potensi



DOKUMEN RENCANA KERJA 2025 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA

sumber daya yang ada untuk menghasilkan nilai tambah barang dan jasa yang berorientasi pada pasar dalam dan luar negeri. Pelaksanaan pembangunan tersebut dilakukan dengan mengutamakan keberpihakan pada masyarakat dan memperkuat keterkaitan serta saling mendukung antara industri dan pertanian yang ditunjang dengan sektor jasa dan kualitas SDM. Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan pengembangan industri dapat lebih efisien dengan wawasan kemasa depan yang dapat menghasilkan produk yang berkualitas dandaya saing tinggi.

URUSAN PERDAGANGAN

Program dan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan usulan dan kebutuhan masyarakat melalui proses Musrenbang sesuai dengan tahapan serta dengan mencermati program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Dokumen Renstra SKPD. Tahapan selanjutnya adalah perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan dan monitoring yang menurut aturan dan ketentuan termasuk kemungkinan pelibatan unsur/pihak ketiga termasuk jasa konsultasi serta rekanan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Program pengembangan perdagangan pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan system perdagangan dalam negeri yang efisien, perlindungan terhadap konsumen dan pengembangan perdagangan luar negeri dalam rangka peningkatan ekspor serta pengendalian impor, tujuan ini sangat erat hubungannya dengan upaya memperkuat pementapan struktur ekonomi daerah.

URUSAN ESDM

Program dan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan usulan dan kebutuhan masyarakat melalui proses Musrenbang sesuai dengan tahapan serta dengan mencermati program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Dokumen Renstra SKPD. Tahapan selanjutnya adalah perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan dan monitoring yang menurut aturan dan ketentuan termasuk kemungkinan pelibatan unsur/pihak ketiga termasuk jasa konsultasi serta rekanan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Program pengembangan ESDM pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan energy baru dan terbarukan dalam rangka mewujudkan ketersediaan energy baru terbarukan.



DOKUMEN RENCANA KERJA 2025
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Tabel 2.4 (Tabel. T-C.32)

Usulan Program Dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Kabupaten Halmahera Utara

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6





DOKUMEN RENCANA KERJA 2025 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1. Sektor Perdagangan

Arah Kebijakan Kementerian Perdagangan :

1. Meningkatnya pertumbuhan ekspor barang non-migas yang bernilai tambah dan jasa
2. Terwujudnya stabilitas harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok
3. Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab
4. Meningkatnya pasar produk dalam negeri
5. Optimalnya peranan PBK, SRG dan PLK
6. Meningkatnya Kinerja perdagangan yang bersih, akuntabel dan profesional
7. Meningkatnya kapabilitas SDM Perdagangan

3.1.2. Sektor Perindustrian

Arah Kebijakan Kementerian Perindustrian

1. Meningkatnya daya saing dan kemandirian industry pengolahan non-migas
2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0
3. Meningkatnya kemampuan industry dalam negeri
4. Meningkatnya penguasaan pasar industry





DOKUMEN RENCANA KERJA 2025 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA

5. Penguatan kewirausahaan dan IKM
6. Meningkatnya persebaran industry
7. Tersedianya regulasi pembangunan industry yang efektif
8. Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan
9. Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien
10. Terwujudnya ASN professional dan berkepribadian
11. Terwujudnya system informasi industry yang berkualitas
12. Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima
13. Tersusunnya perencanaan program pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel

3.1.3. Sektor ESDM

Arah Kebijakan Kementerian ESDM :

1. Meningkatkan kemandirian dan ketahanan energy nasional
2. Optimalisasi ketersediaan produk mineral
3. Meningkatnya pelayanan mitigasi bencana geologi
4. Meningkatnya kompetensi SDM sector
5. Optimalisasi kontribusi sector ESDM yang bertanggung jawab dan berkelanjutan
6. Layanan sector ESDM yang optimal
7. Perumusan kebijakan dan regulasi sector ESDM yang berkualitas
8. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sector ESDM yang efektif





DOKUMEN RENCANA KERJA 2025 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA

9. Penelitian dan pengembangan sector ESDM yang produktif
10. Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima
11. Organisasi yang fit dan SDM yang unggul
12. Optimalisasi teknologi informasi yang terintegrasi
13. Pengelolaan system anggaran yang optimal

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1. Tujuan

Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam perencanaan strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara periode 2021-2026 yaitu :

1. Terwujudnya Optimalisasi pengolahan sumber energy baru terbarukan secara berkeadilan dan berwawasan lingkungan
2. Meningkatnya PDRB

3.2.2. Sasaran

1. Meningkatnya Pemerataan akses penduduk pada sumber energy ketenagalistrikan yang ramah lingkungan
2. Meningkatnya kemandirian dan daya saing industry daerah
3. Meningkatnya peran perdagangan dalam memperkuat ketahanan ekonomi

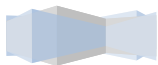
Sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang tertuang didalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026, maka maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023 adalah :





DOKUMEN RENCANA KERJA 2025 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA

1. Sebagai Pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara dalam kurun waktu satu tahun;
2. Sebagai implementasi rencana strategis untuk pencapaian tujuan organisasi.
3. Sebagai upaya nyata atau action plan SKPD dalam mewujudkan masyarakat industry dan perdagangan yang mandiri dan profesional.
4. Sebagai tolok ukur terhadap keberhasilan SKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi





DOKUMEN RENCANA KERJA 2025
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

TABEL 3.1 (TABEL T-C. 33)									
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025									
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026									
KABUPATEN HALMAHERA UTARA									
Nama Perangkat Daerah : Dinas Perdagangan dan Perindustrian									
Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3. 31. 01.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Persen)		90%				90%	
3. 31. 01. 2. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Konsistensi perencanaan perangkat daerah (Persen)		100				100	
3. 31. 01. 2. 01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dagperin	3 Dokumen	4.515.000	DAU		3 Dokumen	21.430.565,00
3. 31. 01. 2. 01. 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dagperin	1 Laporan	2.616.200	DAU		1 Laporan	9.621.442,00
3. 31. 01. 2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi pelaksanaan anggaran perangkat daerah (Persen)		100				100	
3. 31. 01. 2. 02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dagperin	26 Orang/Bulan	2.570.085.652	DAU		26 Orang/Bulan	2.627.690.679,00
3. 31. 01. 2. 02. 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dagperin	1 Laporan	4.490.000	DAU		1 Laporan	8.902.463,00
3. 31. 01. 2. 02. 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Dagperin	18 Laporan	3.710.000	DAU		18 Laporan	12.884.834



DOKUMEN RENCANA KERJA 2025 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA

3. 31. 01. 2. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%				100%	
3. 31. 01. 2. 05. 03	<i>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tobelo	1 Dokumen	2.349.000			1 Dokumen	8.635.725
3. 31. 01. 2. 05. 05	<i>Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tobelo	1 Dokumen	3.710.000			1 Dokumen	13.003.725
3. 31. 01. 2. 05. 09	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	<i>Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	Jakarta	8 Orang	44.597.700	DAU		8 Orang	151.865.516
3. 31. 01. 2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%				100%	
3. 31. 01. 2. 06. 02	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dagperin	1 Paket	19.399.600	DAU		1 Paket	39.774.075,00
3. 31. 01. 2. 06. 05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Dagperin	1 Paket	5.445.000	DAU		1 Paket	12.734.496,00
3. 31. 01. 2. 06. 06	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan</i>	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dagperin	1 Dokumen	17.200.000	DAU		1 Dokumen	32.179.010,00
3. 31. 01. 2. 06. 08	<i>Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Dagperin	1 Laporan	3.311.900	DAU		1 Laporan	12.397.031,00
3. 31. 01. 2. 06. 09	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Sofifi, Jakarta	1 Laporan	33.555.500	DAU		1 Laporan	152.713.890,00
3. 31. 01. 2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)		100%				100%	
3. 31. 01. 2. 08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dagperin	1 Laporan	95.593.800	DAU		1 Laporan	195.129.668
3. 31. 01. 2. 08. 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dagperin	1 Laporan	50.870.800	DAU		1 Laporan	176.670.443
3. 31. 01. 2. 08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dagperin	1 Laporan	43.660.700	DAU		1 Laporan	113.164.118



DOKUMEN RENCANA KERJA 2025 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA

3. 31. 01. 2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)		100%				100%	
3. 31. 01. 2. 09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dagperin	4 Unit	125.140.000	DAU		4 Unit	183.952.448
3. 31. 01. 2. 09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dagperin	20 Unit	4.699.600	DAU		20 Unit	9.550.872
3. 31. 01. 2. 09. 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Dagperin	20 Unit	58.380.000	DAU		20 Unit	366.025.000
3. 29. 05.	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Cakupan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan (persentase terhadap rencana tahun berkenaan)		100%				100%	
3. 29. 05. 2. 01	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki izin di Kab/Kota		100				100	
3. 29. 05. 2. 01. 01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prosedur dan Pesyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dagperin	1 Dokumen	13.082.000	DAU		1 Dokumen	104.449.500
3. 29. 05. 2. 01. 02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dagperin	1 Dokumen	16.357.400	DAU		1 Dokumen	87.799.500
3. 29. 05. 2. 01. 03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dagperin	1 Laporan	7.240.000	DAU		1 Laporan	57.751.000



DOKUMEN RENCANA KERJA 2025

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

KABUPATEN HALMAHERA UTARA

3. 30. 02.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perizinan	Presentase permohonan perijinan usaha perdagangan (IPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) yang diterbitkan rekomendasi teknisnya.		11,9				11,9	
3. 30. 02. 2. 01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Presentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan		85				87	
3. 30. 02. 2. 01. 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dagperin	4 Dokumen	80.019.600	DAU		4 Dokumen	24.419.803,00
3. 30. 02. 2. 02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Presentase penerbitan TDG		80				85	
3. 30. 02. 2. 02. 01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Tobelo, Kao, Galela, Loloda	2 Dokumen	46.679.300	DAU		2 Dokumen	43.079.450
3. 30. 03.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar Rakyat/Tradisional yang beroperasi secara normal		73,9				82,6	
3. 30. 03. 2. 02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Presentase Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		75				80	
3. 30. 03. 2. 02. 01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Tobelo, Kao, Galela	1 Dokumen	27.869.500	DAU		1 Dokumen	233.679.072
3. 30. 04.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase jumlah jenis barang beredar yang sudah diawasi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan		52,3				57,6	
3. 30. 04. 2. 01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan keamanan level stok Barang Kebutuhan Pokok dan Penting Halmahera Utara		100				100	
3. 30. 04. 2. 01. 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Tobelo, Kao, Galela, Loloda	1 Laporan	62.247.600	DAU		1 Laporan	55.797.372



DOKUMEN RENCANA KERJA 2025 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA

3. 30. 04. 2. 02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		100				100	
3. 30. 04. 2. 02. 01	<i>Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>	Tobelo, Galela, Kao, Loloda	1 Laporan	62.251.900	DAU		1 Laporan	26.777.448
3. 30. 04. 2. 02. 03	<i>Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>	Tobelo	2 Laporan	146.800.325	DAU		2 Laporan	520.249.600
3. 30. 06.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase laporan pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti		100				100	
3. 30. 06. 2. 01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Presentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan		95				97	
3. 30. 06. 2. 01. 01	<i>Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang</i>	<i>Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang</i>	Tobelo, Kao, Galela, Loloda	55 Unit	36.675.600	DAU		60 Unit	125.000.000
3. 30. 06. 2. 01. 02	<i>Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal</i>	<i>Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina</i>	Tobelo, Kao, Galela, Loloda	50 Orang	47.139.400	DAU		50 Orang	125.000.000
3. 30. 07.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Cakupan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri (persentase teradap rencana tahun berkenaan)		100				100	
3. 30. 07. 2. 01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Presentase Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		100				100	
3. 30. 07. 2. 01. 02	<i>Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi</i>	Tobelo	10 UMKM	34.356.100	DAU		10 UMKM	59.200.510

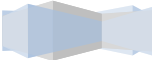


DOKUMEN RENCANA KERJA 2025

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

KABUPATEN HALMAHERA UTARA

3. 31. 02.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pertumbuhan jumlah industri kecil (persen)		7.1				7.2	
3. 31. 02. 2. 01	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Presentase Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		98				99	
3. 31. 02. 2. 01. 02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jakarta	1 Dokumen	19.663.800	DAU		1 Dokumen	94.109.059
3. 31. 02. 2. 01. 06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Tobelo, Kao, Galela	1 Dokumen	11.209.700	DAU		1 Dokumen	65.340.621
3. 31. 03.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Presentase permohonan perijinan usaha industri yang diterbitkan rekomendasi teknisnya		100				100	
3. 31. 03. 2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase Jumlah Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota yang diterbitkan		75				75	
3. 31. 03. 2.01. 01	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usahasektorperindustriandalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidangusahasektorperindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi PenanamanModal DalamNegeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yangmenjadikewenangan pemerintah pusat	Tobelo, Kao, Galela, Loloda	1 Dokumen	16.200.200			1 Dokumen	32.200.500
3. 31. 03. 2.01. 02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Jakarta	1 Dokumen	19.065.000	DAU		1 Dokumen	67.799.500
3. 31. 04.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Presentase jumlah industri kecil dan sedang yang terdaftar dalam basis data SIINAS		100				100	
3. 31. 04. 2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase data perusahaan industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		86				90	
3. 31. 04. 2.01. 01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Tobelo, Kao, Galela, Loloda	1 Dokumen	14.599.200			1 Dokumen	50.099.500
3. 31. 04. 2.01. 03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam penyampaian data ke SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Tobelo, Kao, Galela, Loloda	1 Dokumen	19.065.000	DAU		1 Dokumen	49.900.500





DOKUMEN RENCANA KERJA 2025 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana kerja

Rencana Kerja untuk tahun 2025 , program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara pada dasarnya mengacu pada rencana anggaran Kas dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah dan mengikuti tuntutan jaman sebagai berikut :

4.2. Pendanaan Perangkat Daerah

Pendanaan Perangkat Daerah bersumber dari :

1. DAU

Dana-dana tersebut digunakan untuk pembiayaan di bidang-bidang dalam Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara



DOKUMEN RENCANA KERJA 2025 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan perencanaan pembangunan daerah khususnya sektor perdagangan, perindustrian DAN ESDM sebagai wujud nyata dari tanggung jawab Pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat. *Community Base Development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak pelaku (stake holder) dalam menciptakan *Good Government* sesuai dengan tuntutan paradigma baru yang ditunjang dengan ketersediaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan stackholder dan pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya merembes kebawah sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian kabupaten Halmahera Utara. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, Renja juga dapat dijadikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan staf Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa mendatang.

